

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

EFEKTIVITAS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2022 DI KOTA BOGOR

Emil Salim¹
Agustina Setiawan²
Yovinus³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : elelal2517@gmail.com

Abstrak

Dirasakan bahwa program penanganan permukiman kumuh di Kota Bogor belum berjalan dengan efektif. Dirasakan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor masih memiliki banyak keterbatasan. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan lahan dengan tujuan mewujudkan tatanan pengendalian dan penggunaan lahan yang tertib dan teratur, dalam arti mengembangkan kawasan baru dan mengembangkan kawasan kota di daerah kumuh pada lahan ilegal. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor belum menerapkan penghargaan bagi petugas yang berprestasi, tetapi petugas mendapatkan kepuasan lain, baik material maupun mental. Para pejabat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan inspeksi di area tersebut, dengan berbagai kebijakan pengelolaan yang direncanakan, tetapi masyarakat tidak mau begitu saja menerima rencana ini karena beberapa orang merasa mereka akan terkena dampak negatif akibat pengurangan atau pengambilan sebagian dari tempat tinggal mereka untuk digunakan sebagai jalan umum atau saluran drainase. Penggunaan lahan yang ada di Pulo Geulis umumnya adalah untuk permukiman, Pulo Geulis memiliki posisi yang sangat strategis karena dekat dengan Pusat Kota Bogor.

Kata kunci: Efektivitas, Permukiman Kumuh, Program Perencanaan Spasial.

Abstract

It is felt that the slum settlement program in Bogor City has not been running effectively. It is felt that the services provided by the Bogor City Housing and

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Settlement Department still have many limitations. By increasing the efficiency and productivity of land use with the aim of realizing an orderly and orderly order of control and use of land, in the sense of developing new areas and developing city areas in slum areas on illegal land. The Housing and Settlement Department of Bogor City has not yet implemented rewards for officers who excel, but officers get other satisfaction, whether material or mental. Bogor City Housing and Settlement Service officials inspected the area, with various management policies planned, but the community did not want to just accept this plan because some people felt they would have a negative impact due to leveling or taking away part of their residence to be used as a public road or drainage. The use of existing land in Pulo Geulis is generally residential, Pulo Geulis has a very strategic position because it is close to Bogor City Center.

Keywords: Effectiveness, Slum Settlements, Spatial Planning Program.

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang sejak lama dan berkepanjangan yang telah berkembang di kota-kota besar. Pemandangan atas permukiman kumuh atau permukiman yang tidak layak huni ini selalu kita temui disekitar lingkungan kita bahkan lingkungan permukiman kumuh tersebut termasuk dalam kategori permukiman kita sendiri tanpa kita sadari atau pahami. Banyak dampak-dampak negatif yang selalu hadir dari kawasan lingkungan permukiman kumuh ini, oleh sebab itu permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai sebuah permasalahan. Permasalahan permukiman kumuh yang masih tetap belum terminimalisir walaupun sudah berbagai cara yang dilakukan masih terkendala masalah dan hambatan bagi pengembangan kota yang sehat, tertata dan bersih.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tidak memenuhi syarat. Menurut Undang-undang tersebut dapat diartikan yang dimaksud dengan permukiman kumuh dapat diukur dan dianalisa melalui keadaan lingkungan kawasan permukiman tersebut. Setelah kita paham atas maksud dari tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 maka dapat ditinjau atau melihat kawasan permukiman yang bisa dikatakan permukiman yang layak huni atau permukiman yang tidak layak huni (permukiman kumuh).

Menurut Komarudin (1997), lingkungan permukiman kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri yang meliputi:

- Lingkungan yg berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha)
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah
- Jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar
- Sarana prasarana tidaka ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan
- Hunian dibangun diatas tanag milik negara atau orang lain diluar perundang-undangan yang berlaku.

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota- kota besar maupun kota kecil. Permukiman ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah/datang menetap di Kota yang lebih sejahtera kehidupannya untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota. Perkembangan pembangunan Kota Bogor seperti di kota lain, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Saraswati (2016) memaparkan bahwa pertumbuhan disemua sector pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota yang merupakan daya Tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Sejalan dengan itu kemampuan ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak dapat membenahi kondisi lingkungannya. Kondisi ini mengakibatkan tingginya potensi permukiman kumuh di suatu kawasan. Di sisi lain lambatnya pengantisipasi oleh pemerintah dalam menangani permukiman kumuh menyebabkan semakin kuatnya eksistensi dari permukiman tersebut. Cara pandang yang tidak tepat dalam melihat permasalahan permukiman kumuh akan mengakibatkan kesalahan dalam penanganannya. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor bahwa penanganan kawasan kumuh di kota Bogor dibagi kedalam 8 wilayah kumuh. Antara lain Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Sempur, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Muara Sari, Kelurahan Sindangbarang. Sejauh ini penanganan kawasan kumuh yang dilakukan pemerintah Kota Bogor difokuskan pada Kecamatan Bogor Tengah, karena Kecamatan Bogor Tengah termasuk kedalam penanganan kawasan kumuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing Perangkat Daerah yang ada dalam lingkup pemerintah daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2019-2024, yang berisikan mengenai Perubahan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2021-2024 memuat perubahan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2021- 2024.

Berdasarkan pada rencana strategis tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam penataan kawasan permukiman telah melaksanakan program-program terkait dalam usaha perbaikan permukiman kumuh, diantaranya adalah program peningkatan sarana dan prasarana permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan, peningkatan kualitas lingkungan warga, bantuan untuk rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun, penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan telah dilakukan sebagai bentuk penanganan terhadap permukiman kumuh di Kota Bogor. Hal tersebut juga dalam rangka mengimplementasikan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya sebagai program baru untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh diperkotaan dan mendukung gerakan 1000-100, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor yang melaksanakan program KOTAKU, pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2017. Namun kenyataannya program yang ditujukan untuk menangani permukiman kumuh ini belum sepenuhnya dapat mengatasi permukiman kumuh yang ada. Karena hal tersebut sehingga wilayah permukiman kumuh tersebut masih masuk dalam kategori permukiman kumuh,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

ditambah sedikitnya program pemerintah dalam upaya proses penanganan permukiman kumuh.

Selama beberapa tahun terakhir belum adanya perbedaan yang signifikan terhadap kualitas fisik lingkungan. Kurang terlaksananya program dan pengelolaan dari pemerintah menjadikan kawasan permukiman kumuh ini menarik untuk diteliti seperti rusun yang mangkrak karena para pedagang enggan untuk menempati, pengelolaan sampah pasar dan rumah tangga yang tertumpuk di sudut-sudut jalan, parkir sembarang yang dilakukan kebijakan tata ruang yang dibuat menjadi mentah serta bagaimana pemerintah dan warga setempat dalam mengelola limbah. Penelitian ini juga menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan isu strategis Kota Bogor yaitu untuk menciptakan penataan kawasan permukiman yang bersinergi revitalisasi yang higienis, nyaman, aman, dan tertib.

Untuk mewujudkan program penanganan permukiman kumuh di Kota Bogor perlu pendekatan yang tidak hanya fokus terhadap pendekatan fisik namun perlu memperhatikan pendekatan terhadap karakteristik penghuni (masyarakat) yang tinggal dikawasan permukiman kumuh, karakteristik hunian, karakteristik prasarana pendukung perumahan penunjang dan karakteristik spasial permukiman kumuh tersebut untuk melihat faktor penyebab permukiman kumuh secara menyeluruh sehingga solusi yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di Kota Bogor.

Program penanganan baik fisik maupun non fisik dapat diselaraskan dengan program pemerintah Kota Bogor yang sedang berjalan. Untuk menghasilkan solusi yang sesuai perlu diketahui karakteristik penghuni, hunian, sarana dan prasarana penunjang serta karakteristik spasial serta faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman kumuh di Kota Bogor. Berkaitan dengan hal tersebut, instansi pemerintah sangat penting, arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tanpa tunjangan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan urusannya, perlu dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing- masing Perangkat Daerah yang ada dalam lingkup pemerintah daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2019-2024, yang berisikan mengenai Perubahan Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2021-2024 memuat perubahan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2021- 2024.

Berdasarkan pada rencana strategis tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam penataan kawasan permukiman telah melaksanakan program-program terkait dalam usaha perbaikan permukiman kumuh, diantaranya adalah program peningkatan sarana dan prasarana permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan, peningkatan kualitas lingkungan warga, bantuan untuk rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun, penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis Kawasan telah dilakukan sebagai bentuk penanganan terhadap permukiman kumuh di Kota Bogor. Hal tersebut juga dalam rangka mengimplementasikan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PEMBAHASAN

Efektivitas Dinas Perumahan dan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

Menjamurnya kawasan permukiman kumuh di kota-kota pada umumnya diakibatkan oleh laju urbanisasi yang tinggi dimana kehidupan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan yang kurang beruntung karena sempitnya lapangan kerja di daerahnya. Bermukim di kawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum migran tak terampil yang harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidakteraturan letak bangunan yang berdampak ganda baik yang berkaitan dengan fisik misalnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi ancaman laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Di sisi lain di bidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kawasan kumuh ini. Mulai dari program-program penanggulangan kemiskinan yang dipandang sebagai pendorong mendasar pengembangan kawasan kumuh hingga program-program yang lebih spesifik. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan kemelaratan dengan menerbitkan skema program jaringan pengaman sosial (JPS), mulai dari Inpres Desa Tertinggal, P3DT, PDM-DKE, PLKP, PEMD, Parul (Poverty Alleviation through Rural-Urban Linkages), Program Ketahanan Pangan, sampai dengan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) yang kesemuanya dilaksanakan dengan pola BLM (bantuan langsung kepada masyarakat). Berbagai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, antara lain melalui pendekatan permukiman, telah dirancang dan dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya P2LDT, KIP, P2BPK, CAP, RP4D, dst. Sebagian telah berjalan dengan baik namun sebagian yang lain belum mencapai hasil yang optimal.

Untuk mengatasi masalah kawasan kumuh (slum dan squatter), penting untuk mendorong upaya untuk peningkatan kemampuan masyarakat dan membuka peluang sehingga mereka dapat bekerja pada kehidupan mereka dan mendapatkan peluang pemukiman yang lebih baik. Program-program di atas merupakan program-program yang pada intinya bertujuan untuk peningkatan kemampuan masyarakat sehingga komunitas masyarakat kumuh dapat “menggusur dirinya sendiri”. Melalui program-program ini, dipercaya bahwa pemerintah dapat dibantu dengan menciptakan kebijakan ekonomi dan program untuk mengelola masalah kawasan kumuh melalui berbagai cara untuk menangani pekerjaan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Melalui pendekatan-pendekatan ini, stakeholder dapat bekerja sama untuk menangani kondisi fisik, sosial, dan ekonomi pada golongan masyarakat ini.

Di sisi lain lambatnya pengantisipasi oleh pemerintah dalam menangani permukiman kumuh menyebabkan semakin kuatnya eksistensi dari permukiman

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tersebut. Cara pandang yang tidak tepat dalam melihat permasalahan permukiman kumuh akan mengakibatkan kesalahan dalam penanganannya. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, penanganan kawasan kumuh di kota Bogor dibagi kedalam 8 wilayah kumuh. Antara lain Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Sempur, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Muara Sari, Kelurahan Sindangbarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, instansi pemerintah sangat penting, arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa tunjangan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang. Oleh karenanya analisis dilakukan dengan ukuran efektivitas menurut Gibson, dkk (2018:25) sebagai berikut.

- Pembuatan Program dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Bentuk produksi program yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan produk dari pelayanan dan penyuluhan dari aparatur kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan antara input dan output, usaha dengan hasil yang dicapai, dan pencapaian program kerja yang telah dicapai saat ini.

Anggaran yang telah ditetapkan oleh pusat untuk program penataan permukiman kumuh di Kota Bogor belum berjalan efektif, berdasarkan hasil penelitian melalui warga, bahwa pelayanan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dirasa masih banyak kekurangan, mulai dari alat-alat, sosialisasi penataan, peninjauan kawasan permukiman kumuh, dan sarana fasilitas air bersih, kamar mandi umum dan saluran drainase dikawasan permukiman kumuh, padahal anggaran sangatlah besar. Mengenai target atau sasaran yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

Program Kotaku ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menetapkan targettarget pembangunan kawasan dan penanggulangan kemiskinan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

diantaranya berupa pengentasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%, sehingga program Kotaku tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Pemerintah Kota Bogor berharap dengan terbangunnya kolaborasi ini, akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh, dimana pemerintah sebagai nakhoda dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan serta pemerintahpusat sebagai pendamping pemerintah daerah. Di samping itu Pemerintah Kota Bogor dalam pengentasan wilayah permukiman kumuh ini, memiliki beberapa peran yang sangat strategis sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan kawasan permukiman Kota Tanpa Kumuh tersebut, dan beberapa peran strategis lainnya.

- Efisiensi dalam Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan dinas yang berdiri sendiri dan berfungsi untuk melakukan pelayanan kebutuhan masyarakat Kota Bogor terlebih khususnya dalam tata ruang dan penataan permukiman serta penataan letak tata Kota. Dalam hal ini aparaturnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor diharuskan dapat bekerja secara efisien dan kreatif untuk memenuhi pencapaian target kerja.

Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana penyakit dan keamanan.

Konsep sosialisasi terstruktur dan berkelanjutan ini sangat mengedepankan proses pendekatan informasi berbasis masyarakat (Community based Information).

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Maksudnya adalah bagaimana caranya informasi-informasi terkait pembangunan dimana sebelumnya masyarakat menjadi obyek pembangunan, dirubah menjadi masyarakat yang menjadi subyek pembangunan. Sosialisasi melibatkan proses pembelajaran. Pembelajaran tidak sekedar di sekolah formal, melainkan berjalan di setiap saat dan di mana saja. Yang dimaksud dengan belajar atau pembelajaran adalah modifikasi perilaku seseorang yang relatif permanen yang diperoleh dari pengalamannya di dalam lingkungan sosial/ fisik. Perilaku tersebut merupakan hasil belajar yang diperoleh dari lingkungan di mana masyarakat berdomisili. Dengan demikian dengan konsep ini masyarakat menjadi lebih mengerti dan paham terhadap situasi terkini dengan berbagai konsekuensinya.

- Kepuasan dalam Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kepuasan yang didapat dari aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sendiri bermacam-macam, karena didalam Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tidak diterapkannya reward bagi aparatur yang berprestasi, tetapi aparatur mendapatkan kepuasan lain, baik itu secara materi atau batin. Selain anggota kelompok organisasi, adapula kelompok masyarakat yang mendapatkan kepuasan dari hasil pelayanan.

Kepuasan materi yang didapatkan oleh anggota organisasi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan kepuasan yang bisa dirasakan dan didapat melalui gaji yang didapat. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa aparatur di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mendapat gaji yang cukup besar, sesuai dengan kinerja mereka, berdasarkan informasi bahwa gaji pegawai di bagian UPT Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor cukup untuk kehidupan mereka, itu artinya kepuasan yang didapat anggota kelompok dari materi cukup bagus.

Sedangkan kepuasan batin yang didapat oleh anggota kelompok organisasi adalah apabila organisasi di dalam Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor bisa

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

menjalankan program penataan permukiman kumuh di Kota Bogor yang telah direncanakan bisa mencapai sebuah tujuan, yaitu perwujudan kawasan lingkungan permukiman yang tertata rapi dan sehat. Apabila penataan permukiman kumuh sudah bisa terpenuhi seluruhnya, maka program yang telah dijalankan bisa dikatakan efektif. Oleh sebab itu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dapat mencapai program tersebut, maka masyarakat akan mendapatkan kepuasan batin.

- Keadaptasian Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pulo Geulis berada di pinggir sungai yang tidak tertata dengan baik, hal ini ditandai dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang merambah badan sungai, hal ini menimbulkan penyempitan sungai dan kawasan terlihat kumuh. Masyarakat Pulo Geulis menganggap sungai sebagai bagian belakang dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari seluruh bangunan rumah yang sebageian besar tidak menghadap ke sungai melainkan membelakangi sungai. Dengan orientasi bahwa sungai sebagai bagian belakang rumah maka, sungai sebagai tempat pembuangan baik itu limbah padat (sampah) maupun limbah cair (MCK). Karena keterbatasan kemampuan ekonomi warga lebih memilih tinggal di bantaran sungai, hal ini dikarenakan harga lahan di bantaran sungai relatif lebih murah, faktor lokasi yang mempunyai aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas karena berada di kawasan pusat Kota Bogor. Walaupun disadari bahwa tinggal di bantaran sungai terdapat ancaman banjir dan ancaman penyakit karena kondisi lingkungan yang tidak baik.

Dari tahun ke tahun kecenderungan semakin meningkatnya jumlah rumah/permukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Oleh karena itu perlu diantisipasi perkembangan tersebut sehingga tidak mengurangi fungsi lingkungan yang diemban oleh Sungai Ciliwung. Selain itu juga resiko bencana banjir maupun penyakit bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung dapat ditekan.

Walaupun Pulo Geulis berada atau dekat dengan Pusat Kota Bogor kawasan permukiman yang berada di bantaran Sungai Ciliwung ini tidak memiliki infrastruktur

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

yang memadai. Hal ini terlihat dari jaringan jalan yang berupa gang sempit yang tidak beraturan polanya, akses yang menghubungkan ke Pulo Geulis adalah melalui jembatan kecil dengan lebar + 1,20 Meter, dan terdapat di beberapa tempat. Sementara di Pulo Geulis sendiri jalan yang ada hanya merupakan jalan lingkungan dengan lebar antara 1,00 – 2,00 meter saja dengan kondisi struktur semenisasi. Sistem jaringan drainase yang ada di Pulo Geulis saat ini masih tergolong kurang baik, sistem jaringan drainase yang tidak memadai rentan terjadinya pengotoran sungai oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan beberapa pengembangan jaringan drainase yang lebih baik diantaranya:

- Sistem jaringan drainase yang dibangun sebaiknya menggunakan konsep pemompaan menuju tempat penampungan yang terlebih dahulu telah disiapkan kemudian diolah sebelum dibuang kesungai.
- Normalisasi sistem drainase dan memperkuat dam/turap disekeliling Pulo Geulis.
- Pembangunan bangunan baru harus memperhatikan kelestarian sungai.
- Pembangunan bangunan baru–langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan membangun di atas sungai dan atau memakan badan sungai, serta harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Pada dasarnya, Pemanfaatan lahan eksisting di Pulo Geulis umumnya adalah permukiman, Pulo Geulis memiliki posisi yang sangat strategis karna dekat dengan Pusat Kota Bogor.

Posisi Pulo Geulis yang dekat dengan Pusat Kota Bogor memerlukan penanganan khusus agar bisa bersinergi dengan kawasan sekitarnya. Karakteristik masyarakat Pulo Geulis adalah berpenghasilan rendah dan tingkat pendidikan yang juga rendah. Kombinasi antara tingkat pendidikan dengan kemampuan ekonomi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Terlebih lagi Pulo Geulis ini berada dipinggir sungai, sehingga dengan semakin berkembangnya permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, maka akan memberi kontribusi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

yang besar dalam menurunkan kualitas Sungai Ciliwung.

Penurunan kualitas dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat yang rendah juga oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan sungai juga rendah. Hal ini terlihat dari kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarang ke sungai. Masyarakat Pulo Geulis tidak memiliki akses untuk berkegiatan ekonomi secara lebih baik karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penataan kawasan kumuh Pulo Geulis ini perlu dilakukan pula peningkatan kapasitas masyarakat terutama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, serta menjaga kualitas lingkungan.

Sarana ekonomi-perdagangan dan jasa merupakan salah satu sarana yang sangat membantu dalam pengembangan potensi ekonomi kawasan. Selain itu sarana perdagangan juga sangat membantu dalam pola pemasaran hasil industri kecil yang telah dan sedang dijalankan oleh masyarakat. Sekilas pandangan, masyarakat yang tinggal di Pulo Geulis bukanlah masyarakat yang sama sekali tidak berdaya atau miskin. Sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai pedagang dan penjual jasa di luar kawasan mereka sendiri yaitu di Pasar Bogor.

Ada banyak variasi barang dan dagangan yang mereka tawarkan, mulai dari penjual sayurmayur, makanan kecil, bakso keliling, pakaian, dll. Sebagian lagi berprofesi sebagai pekerja di Terminal Baranangsiang dan juga berjualan kaki lima di terminal ini. Melihat dekatnya jarak antara kawasan Pulo Geulis dengan dua lokasi tersebut diatas dan lokasi lain yang masih berdekatan, dapat dikatakan transaksi ekonomi ritail (tukang dagang aneka-ragam penganan dan kelontong) di seputar kawasan Bogor Tengah tidak terlepas dari peran dan kontribusi masyarakat Pulo Geulis atau dengan kata lain sebagai sentra perdagangan dan jasa yang dianggap bernilai strategis.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

KESIMPULAN

Dalam pembuatan program, bentuk produksi program yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan produk dari pelayanan dan penyuluhan dari aparaturnya kepada masyarakat. Namun sejauh ini program penataan permukiman kumuh di Kota Bogor belum berjalan efektif, berdasarkan hasil penelitian melalui warga, bahwa pelayanan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dirasa masih banyak keterbatasan, mulai dari alat-alat, sosialisasi penataan, peninjauan kawasan permukiman kumuh, dan sarana fasilitas air bersih, kamar mandi umum dan saluran drainase dikawasan permukiman kumuh, padahal anggaran sangatlah besar. Adapun dalam penataan infrastruktur lingkungan berencana untuk memperkuat sistem perumahan untuk masyarakat melalui upaya untuk mengembangkan lebih lanjut pedoman perbaikan perumahan dan jalan/jembatan dan membangun sistem jaringan untuk mengembangkan pola sebaran penduduk, penataan dan pengembangan perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam efisiensi, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah dengan sasaran untuk mewujudkan suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur, dalam arti untuk pengembangan kawasan baru maupun pembangunan kawasan kota Kawasan kumuh di atas tanah illegal.

Dalam tingkat kepuasan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor belum diterapkannya reward bagi aparaturnya yang berprestasi, tetapi aparaturnya mendapatkan kepuasan lain, baik itu secara materi atau batin. Selain anggota kelompok organisasi, adapula kelompok masyarakat yang mendapatkan kepuasan dari hasil pelayanan. Kepuasan materi yang didapatkan oleh anggota organisasi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan kepuasan yang bisa dirasakan dan didapat melalui gaji yang didapat. Sedangkan dalam penataan permukiman kumuh sendiri dapat dilihat dari nfrastruktur dan persaranaan yang dimaksud dapat melalui perumahan, bangunan usaha, organisasi air bersih, drainase, limbah padat, organisasi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pemborosan air, dan sistem lainnya. Salah satu upaya khusus adalah bersiap- siap untuk pengembangan rumah susun.

Dalam keadaptasian, aparaturnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor meninjau kawasan tersebut, dengan berbagai kebijakan penanganan direncanakan, akan tetapi masyarakat tidak mau menerima begitu saja perencanaan tersebut dikarenakan sebagian masyarakat merasa mendapatkan dampak negatif karena pemerataan atau pengambilan sebagian tempat bermukim mereka untuk dijadikan jalan umum ataupun drainase. Aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam potensinya dalam pencegahan peningkatan permukiman kumuh telah melakukan kerjasama dengan satuan polisi pamong praja yang berada di setiap kecamatan di Kota Bogor dan setiap kepala kelurahan yang diberikan wewenang untuk melaporkan setiap kejanggalan yang berada kawasan permukiman.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dilakukan untuk pencegahan peningkatan permukiman kumuh di Kota Bogor adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan ke setiap daerah yang diduga mengalami peningkatan permukiman kumuh. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman bekerjasama dengan satpol PP kalau memang diharuskan apabila masyarakat tetap bersikeras jika dilakukan penyuluhan dan pembongkaran bangunan yang ilegal milik masyarakat.

Dalam pengembangan, Pemanfaatan lahan eksisting di Pulo Geulis umumnya adalah permukiman, Pulo Geulis memiliki posisi yang sangat strategis karna dekat dengan Pusat Kota Bogor. Posisi Pulo Geulis yang dekat dengan Pusat Kota Bogor memerlukan penanganan khusus agar bisa bersinergi dengan kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam penataan kawasan kumuh Pulo Geulis ini perlu dilakukan pula peningkatan kapasitas masyarakat terutama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, serta menjaga kualitas lingkungan. Sarana ekonomi- perdagangan dan jasa merupakan salah satu sarana yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sangat membantu dalam pengembangan potensi ekonomi kawasan. Selain itu sarana perdagangan juga sangat membantu dalam pola pemasaran hasil industri kecil yang telah dan sedang dijalankan oleh masyarakat. Pengelolaan limbah harus diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga kenyamanan tidak terganggu. Berbagai cara atau metode untuk aplikasi sistem pembuangan limbah padat, antara lain adalah pembuangan secara terbuka, penimbungan dengan tanah, kompos dan pembakaran. Namun, penggunaan cara-cara yang memiliki persyaratan untuk mencegah/menekan terjadinya pencemaran air dan lingkungan masih sedikit mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, JL., dkk. (2013). Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga
- Gibson, JL., JM Ivacevich., JK Donnelly. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
- Hudalah, Delik. (2005). Pendekatan Pemberdayaan dalam Penanganan Daerah Permukiman. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 16, No (3) Jayani, DH. (2019). Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia. Jakarta: Pustaka
- Putri, Kholisma., Mohammad Agung Ridlo. (2023). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. Semarang: Universitas Islam Sutan Agung Semarang
- Saraswati, Dian Ayu. (2016). Analisis Perubahan Luas dan Pola Persebaran Permukiman. Semarang: Geodesi UNDIP
- Sinulingga. (2005). Elemen-elemen Pembentuk Struktur Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Surtiani, Endang Eny. (2006). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota. Semarang: Unissula
- Susilowati, Indah Sri. (2007). Evaluasi Penataan Ruang Kawasan Lindung dan Resapan air di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu. Bandung: ITB Press
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan
dan Permukiman Tahun 2019-2024